

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Secara konseptual setiap negara tentu akan mempunyai bentuk yang berbeda antara satu negara dengan berbagai negara. Bentuk negara bisa dikelompokkan menjadi dua jenis, berupa negara kesatuan dan negara federal. Negara di Asia Tenggara yaitu Indonesia tergolong ke dalam negara dengan berbentuk kesatuan yang memiliki ciri khusus yaitu sistem pemerintahan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat dan dapat disebut sebagai sentralisasi atau dekonsentrasi. Dalam menjalankan pemerintahan tentunya tidak akan efisien jika semua kewenangan dilaksanakan oleh suatu hierarki yang tertinggi yaitu Pemerintah Pusat. Maka daripada itu, sebagian kewenangan politik dan administrasi dari hierarki yang tinggi akan didelegasikan kepada hierarki yang lebih rendah yaitu Pemerintah Daerah. Istilah atas pendelegasian sebagian kewenangan disebut desentralisasi. Tujuan dilakukan pelimpahan kepada hierarki yang lebih rendah diharapkan agar kebijakan yang dibuat dan pelaksanaannya dapat terimplementasikan secara efisien dan akuntabel (Nurcholis, 2007, pp. 1-20).

Implikasi dari pelimpahan wewenang ke hierarki yang lebih rendah memunculkan suatu otonomi yang berarti kebebasan suatu daerah untuk mengelola

dan menyelenggarakan kepentingannya sendiri. Tujuan dari penerapan otonomi daerah berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu demi meningkatkan masyarakat sejahtera, pelayanan umum, serta daya saing daerah (Prabandari, 2020).

Dalam menjalankan sebuah sistem pemerintahan baik untuk penyelenggaraan di pusat maupun di daerah dibutuhkan suatu sistem akuntansi. Penerapan sistem akuntansi di Indonesia mengalami banyak perubahan hingga pada tahun 2003 terjadi reformasi dalam manajemen keuangan negara dengan penerbitan atas 3 (tiga) paket undang-undang keuangan negara yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pada tahun 2010 ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang mengharuskan pemerintahan di pusat dan pemerintahan di daerah menerapkan akuntansi berbasis akrual penuh (*full accrual accounting*) dan beralih pada penerapan basis *cash toward accrual* tahun 2015 paling lama. Pada Pemerintahan Daerah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan ketentuan penggunaan basis akrual sesuai pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual dalam otonomi daerah bertujuan untuk mencapai informasi yang akurat dan spesifik yang berpedoman pada aturan

akuntansi pemerintah, karena hal tersebut merupakan bentuk komitmen pelaksanaan APBN dan APBD berdasarkan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003.

Provinsi Lampung menjadi pilihan penulis sebagai tempat tujuan memperoleh data untuk karya tulis ini. Provinsi Lampung memiliki keistimewaan dibandingkan banyak provinsi yang membentang dari ujung timur hingga ujung barat Indonesia yang dikenal sebagai *Little Indonesia*. Hal itu memaknai bahwa terdapat beragam suku yang menjalankan kehidupan di Lampung (IDN Times, 2022). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pengguna anggaran wajib mengikuti peraturan yang berlaku perihal penerapan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran (Disdukcapil Kota Bandar Lampung, 2016). Laporan keuangan yang dihasilkan Disdukcapil Kota Bandar Lampung akan disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Konsolidator selaku entitas pelaporan yang selanjutnya akan dikonsolidasikan dengan SKPD yang lain untuk menjadikannya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Lampung. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menjadi subjek penelitian yang penulis pilih karena beragam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seperti pengurusan untuk Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga, KTP Elektronik, dan Pelayanan Lainnya. Hal tersebut memiliki arti bahwa lebih banyak transaksi yang melibatkan pos akun beban dan belanja barang dan jasa.

Berlandaskan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada PSAP 12 tentang Laporan Operasional (LO) dan pada PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis Kas. Struktur LO dan LRA mencakup beberapa pos, salah satunya yaitu pos terkait beban dan belanja. Pos beban dan belanja disajikan menurut dasar klasifikasi ekonomi/jenis. Penyajian klasifikasi ekonomi yang diterapkan pemerintah daerah pada pos beban mencakup beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban amortisasi/penyusutan aset tetap, beban tak terduga, beban transfer, dan beban bantuan sosial. Sedangkan pada pos belanja mencakup belanja pegawai, belanja modal, belanja subsidi, belanja barang, hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga.

Penerapan akuntansi beban dan belanja wajib dilakukan dengan mengikuti tatacara sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan pemerintah kota demi terwujudnya laporan keuangan yang dapat dipastikan kebenarannya, dapat dibandingkan, dapat dipercayakan sumbernya, dan dapat dipahami. Berdasarkan ulasan yang dijabarkan, penulis tertarik untuk mengamati dan meninjau penerapan akuntansi pos beban dan belanja, khususnya beban dan belanja barang dan jasa pada Disdukcapil Kota Bandar Lampung yang kemudian penulis akan membatasi pada tahun anggaran 2020. Oleh karena itu, penulis akan menuangkan tinjauan tersebut dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang berjudul “Tinjauan Atas Penerapan Akuntansi Beban dan Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Didasari dari latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang akan dibahas penulis pada Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) sebagai berikut.

- 1) Bagaimana kebijakan akuntansi beban dan belanja barang dan jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung?
- 2) Bagaimana implementasi dan penyajian laporan keuangan terkait akuntansi beban dan belanja barang dan jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung?
- 3) Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi beban dan belanja barang dan jasa pada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung terhadap peraturan yang berlaku?
- 4) Apakah terdapat kendala dalam penerapan akuntansi beban dan belanja barang dan jasa pada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang ingin dicapai oleh penulis sebagai berikut.

- 1) Mengetahui kebijakan akuntansi beban dan belanja barang dan jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung
- 2) Mengetahui implementasi dan penyajian laporan keuangan terkait akuntansi beban dan belanja barang dan jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

- 3) Mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi beban dan belanja barang dan jasa pada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung terhadap peraturan yang berlaku
- 4) Mengidentifikasi terdapatnya kendala dalam penerapan akuntansi beban dan belanja barang dan jasa pada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian atas penerapan akuntansi beban dan belanja barang dan jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung pada tahun anggaran 2020.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat penulisan yang diharapkan pada Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini berupa manfaat secara akademis dan aplikatif, antara lain:

##### **1) Manfaat Akademis**

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan mengenai penerapan kebijakan dan implementasi akuntansi beban dan belanja barang dan jasa di sektor pemerintah daerah dan menjadi penambah ilmu pengetahuan secara teoritis terkait materi akuntansi beban dan belanja barang dan jasa pada pengaplikasian sistem akuntansi Satuan Kerja dan Perangkat Daerah.

##### **2) Manfaat Praktis**

###### **a) Bagi penulis**

Penulis berharap KTTA ini dapat menjadi media yang berbobot untuk dimanfaatkan dalam mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan penulis tentang akuntansi beban dan belanja barang dan jasa di dalam sektor pemerintah daerah.

b) Bagi penulis selanjutnya

Penulis berharap KTTA ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penulis selanjutnya yang menggunakan topik serupa untuk melakukan pengembangan teori.

c) Bagi masyarakat

Penulis berharap KTTA ini dapat menjadi wadah pengetahuan yang berguna dan mudah dipahami oleh masyarakat mengenai penerapan akuntansi beban dan belanja barang dan jasa pada sektor pemerintah daerah.

d) Bagi objek yang bersangkutan

Penulis berharap KTTA ini dapat dijadikan menjadi sumber informasi dan bahan pengkajian atas penerapan akuntansi beban dan belanja barang dan jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan alasan yang melatarbelakangi penulis memilih membahas topik dan objek yang dipilih, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan karya tulis tugas akhir ini.

### BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis akan memberikan pemaparan mengenai teori-teori, dasar hukum, dan/atau penelitian sebelumnya yang relevan terkait topik yang diangkat mengenai beban dan belanja barang dan jasa pada sektor pemerintah daerah.

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan memaparkan metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penulisan karya tulis ini. Objek yang dipilih dijadikan gambaran umum sebagai bahan penelitian. Kemudian penulis menjelaskan terkait hasil tinjauan atas penerapan akuntansi beban dan belanja barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Penjelasan tersebut dibatasi pada tahun anggaran 2020.

### BAB IV KESIMPULAN

Pada bab ini merupakan bab akhir dari KTTA. Penulis akan menyajikan kesimpulan berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya terkait tinjauan atas penerapan akuntansi beban dan belanja barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.